

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis statistic inferensial menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Faktor Penghambat Pengadaan Barang/Jasa (Y).
2. Variabel Teknologi ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Faktor Penghambat Pengadaan Barang/Jasa (Y).
3. Variabel Hukum ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Faktor Penghambat Pengadaan Barang/Jasa (Y).

#### **6.2 Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai sumber daya manusia, teknologi, hukum untuk berjalannya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut :

1. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah NTT perlu adanya sosialisasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa dan sosialisasi penggunaan email, pelatihan dan ujian sertifikasi untuk memahami Pengadaan Barang/Jasa.

2. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah NTT disarankan untuk menambahkan kapasitas server serta perlu adanya penyediaan genset dalam kapasitas besar dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan PLN untuk menunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah NTT disarankan untuk menciptakan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu juga dilakukan koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan pihak SKPD terkait dalam klarifikasi dokumen dan perlu dilibatkan staf dari instansi terkait untuk klarifikasi dokumen.
4. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil ,diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang menghambat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku;**

- Arifiyadi, T. (2010). *Analisis Hukum Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Elektronik Procurement) Pada Instansi Pemerintah*. Jakarta: FH Universitas Indonesia.
- Airlangga, U. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Dirgantara, P. (2009). *Rekomendasi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Hambatan Penyedia Jasa Konsultansi Secara Elektronik (EProcurement)*. Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Haryati, D., Anditya, A., & Wibowo, R. A. (2011). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 328-342.
- Luknanto, D. (2004). *Modul Kebijakan dan Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa*. Yogyakarta.
- McCue, C., & Roman, V. A. (2012). E-Procurement : Myth Or Reality? *Journal of Public Procurement*, 212-238.
- Muhtar, T. (2011). Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah. *Infrastruktur*, 43-53.
- Pemerintah. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pramasari, K. L. (2014). *Penerapan Sistem e-Procurement Dalam Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa*. Denpasar: Universitas Udayana.
- PU, M. (2005). *Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Elektronik*. Jakarta.
- Unair. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012*. Surabaya: Airlangga University Press.

### **Jurnal;**

- Donny Andrea Ekaputra. 2016. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Dr. Socia Prihwantoro, S.E., M.M. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Barang Dan Jasa Pada Lpse Kementerian Keuangan. Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Labora
- Homsiah Basrie. 2017. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Universitas Bengkulu Program Pasca Sarjana Magister Manajemen
- Mulyati, Usniawati Keristin. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemaka Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Pemerintah Kota Palembang. Manajemen, STIE MDP
- Nur Endah Prihastuti. 2014. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement) Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Program Studi Magister Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Proyek Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Utari Swadesi. 2017. Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (*E Procurement*) Pada Lpse Kota Pekanbaru. Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

**Website;**

<http://lpse.pekanbaru.go.id>

<http://sirup.lkpp.go.id>

<http://www.lkpp.go.id/v3/>

[http://www.lkpp.go.ig,](http://www.lkpp.go.ig)

[www.lpse.namakldi.go.id](http://www.lpse.namakldi.go.id)

**Undang-undang;**

Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2012. Tentang Unit Layanan Pengadaan barang/jasa, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (Perubahan Ke 4 atas peraturan presiden) Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.  
Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.